

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1. Pengertian KTSP.

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin yakni "currere" secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada batas start dan batas Finish. Dalam dunia pendidikan pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai bahan ajar yang sudah ditentukan kapan dimulai dan kapan diakhiri yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.¹ David Pratt dalam *Curriculum Design and Development*, mendefinisikan: "A Curriculum is an organized set of formal educational and or training intention"² Artinya kurikulum adalah suatu bentuk satuan yang diorganisir dalam pendidikan formal atau pelatihan.

Dr Muhammad Adnan Latief mengartikan kurikulum adalah suatu rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar.³ Maka menurutnya tujuan dan pengalaman belajar menjadi aspek yang sangat penting dalam kurikulum yang ditentukan oleh keinginan, keyakinan, atau pengetahuan serta kemampuan anggota masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.

Hilda Taba seperti yang dikutip oleh Muhammad Ali mengartikan : *A curriculum is a plan for learning, What is known about the learning process and the development of individual has bearing on the shaping of a curriculum.* Kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh

¹Prof. H. Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 2.

²David Pratt, *Design and Development Curriculum*, (New York: Harcourt Brace Javanovich Publishers, 1980), hlm. 4.

³Muhammad Adnan Latif Dalam *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum Untuk Abad ke-21*, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 85.

karena itu konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum.⁴

Sedangkan B. Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J. Harlan Shores memandang kurikulum sebagai "*a sequence of potential experiences set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting*". Mereka mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya.⁵

Menurut Fatah Syukur kurikulum merupakan rencana pelajaran yang dipakai sebagai patokan dalam proses pembelajaran yang mengacu kepada tujuan suatu lembaga pendidikan.⁶ Sedangkan menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Kurikulum dalam pandangan modern ialah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah.⁷ Pandangan modern ini dapat juga diartikan kurikulum secara luas yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah/madrasah

Oemar Hamalik menyatakan bahwa pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yakni tinjauan menurut pandangan lama dan tinjauan menurut pandangan baru. Pengertian kurikulum menurut pandangan lama merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk murid untuk memperoleh ijazah, sedangkan menurut pandangan baru merumuskan bahwa kurikulum bukan saja terdiri dari mata pelajaran tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, yaitu semua

⁴Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 7.

⁵S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.5.

⁶Fatah Syukur, *Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri*, (Semarang, PKPI2-PMDC, 2003), hlm. 136.

⁷Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 53.

pengalaman yang dengan sengaja disediakan oleh sekolah bagi para siswanya untuk mencapai tujuan pendidikan.⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.⁹

Dari beberapa definisi kurikulum yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum merupakan pengalaman peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum tidak hanya terbatas hanya pada mata pelajaran saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara evaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya.

Maka secara umum, keberadaan kurikulum menggambarkan suatu rencana tentang jenis pengalaman-pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, hendaknya kurikulum berperan dan bersifat *antisipatif* terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung satu sama lain. Salah satu komponen kurikulum adalah komponen isi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud

⁸Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 27..

⁹*Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 2003), hlm. 5.

biasanya berupa meteri bidang studi.¹⁰ Maka dari itu kurikulum harus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman.

Dasar perlunya perubahan kurikulum menurut Muhadi (2002) seperti yang dikutip Djoko Susilo:

"Bahwa saat terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang perlu segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan. Di mana peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti pembaharuan dan diservikasi".¹¹

Dengan dasar itulah KTSP menjadi satu terobosan kurikulum yang diharapkan mampu membawa perbaikan dalam pendidikan nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah suatu ide pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Dengan cara memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi satuan pendidikan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada agar dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. KTSP dikembangkan melalui upaya pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar di lingkungan masing-masing tingkat satuan pendidikan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 1, ayat15) di jelaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).¹²

KTSP menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan agar dapat memodifikasi keinginan masyarakat setempat, serta

¹⁰Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Jakarta: Media Pratama, 1999), hlm. 15.

¹¹Muhammad Djoko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 10.

¹²E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 20.

menjalin kerja sama yang erat antar sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.¹³

KTSP mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kurikulum- kurikulum sebelumnya. Karakteristik tersebut antara lain :

- a. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. dengan tidak meninggalkan seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Melalui otonomi yang luas ini satuan pendidikan berhak mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Masyarakat dan orang tua murid diharapkan mempunyai partisipasi aktif bagi kemajuan sekolah, tidak hanya melalui bantuan keuangan akan tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan untuk merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Maksudnya dalam KTSP pengembangan dan pelaksanaan didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. kepala sekolah dan guru-guru diharapkan mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama serta pelaksanaannya.
- d. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan mulai dari dewan pendidikan, komite sekolah, dewan guru sampai pada pegawai sekolah.¹⁴

¹³Muhammad Djoko Susilo, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁴E. Mulyasa , *op. cit.*, hlm. 29-31.

2. Landasan KTSP

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah pasal 1 ayat (19); pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); pasal 32 ayat (1), (2), (3); pasal 35 ayat (2); pasal 36 ayat (1), (2), (3); pasal 38 ayat (1), (2)
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); pasal 5 ayat (1), (2); pasal 6 ayat (6); pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); pasal 8 ayat (1), (2), (3); pasal 10 ayat (1), (2), (3), pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); pasal 14 ayat (1), (2), (3); pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); pasal 17 ayat (1), (2); pasal 18 ayat (1), (3) pasal 20.
- c. Standar Isi
SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.
- d. Standar Kompetensi Lulusan
SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.¹⁵

3. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Adapun secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia.

¹⁵Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, (Jakarta: 2006), hlm. 4.

- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.¹⁶

4. Prinsip pengembangan KTSP

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten / kota setempat untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi dan Standar kompetensi lulusan dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah.¹⁷

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

¹⁶E. Mulyasa, *op.cit.*, hlm. 22.

¹⁷Khaeruddin Dan Mahfud Junaedi Dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep Dan Implementasinya di Madrasah*, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 80.

- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Untuk itu semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Maksudnya pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya dunia kerja.
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang diajarkan selalu berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
- f. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ide inilah yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan kurikulum.
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸

5. Standar Kompetensi Lulusan KTSP

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan *holistik* pada jenjang pendidikan dasar dan

¹⁸Badan Standar Nasional Pendidikan, *Op.Cit.*, hlm. 5-7.

menengah serta merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.¹⁹

Standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.²⁰

6. Komponen KTSP

Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain :

a. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan.

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dasar, tujuannya adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya.
- 2) Pendidikan menengah, tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya sesuai dengan kejuruannya.
- 3) Pendidikan menengah kejuruan, tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

¹⁹E. Mulyasa, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²⁰*Ibid.*, hlm. 92.

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya.²¹

b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut : kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.²²

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan /atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

c. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan

²¹Khaeruddin Dan Mahfud Junaedi Dkk, *op.cit.*, hlm. 84.

²²Muhaimin, Dkk, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 50.

memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi.²³

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kalender pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- 2) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran.
- 3) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
- 4) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam setiap minggu, meliputi jumlah jam untuk setiap mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah dengan jam jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.²⁴

d. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Silabus adalah rencana pembelajaran dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.²⁵

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan

²³Khaeruddin Dan Mahfud Junaedi Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 90.

²⁴Muhaimin, Dkk *op.cit.*, hlm. 330.

²⁵*Ibid.*, hlm. 112.

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.²⁶ Berdasarkan silabus inilah guru bisa mengembangkannya menjadi RPP yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa.

Pengembangan silabus pada dasarnya merupakan upaya melakukan analisis kompetensi ke dalam kompetensi dasar dan indikator-indikator, analisis materi ke dalam *scop* (ruang lingkup) dan *sequence* (urutan) materi, analisis belajar ke dalam jenis dan bentuk kegiatan belajar mengajar, dan analisis penilaian ke dalam jenis dan alat-alat penilaian, yang semuanya itu bermuara pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus disusun berdasarkan standar isi, yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar.²⁷

B. Fikih

1. Pengertian Fikih

الْفِئَةُ وَهُوَ لَعَةُ الْفَهْمِ²⁸

Fikih menurut bahasa artinya faham.

Maka secara harfiah Fikih dapat diartikan faham seperti firman Allah dalam surat At-taubah ayat 122 yang berbunyi :

لِيَتَفَقَّحُوا فِي الدِّينِ (التوبة : ١٢٢)

Artinya : untuk mereka bertafaqquh dalam agama.²⁹

²⁶Mansur Muslih, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 32.

²⁷Muhaimin, Dkk, *op.cit.*, hlm. 335.

²⁸Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahab, Juz 1*,(Surabaya: Darkutub Islam), hlm. 3.

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), hlm. 206.

Ialah : untuk mereka memahami dan mendalami segala hukum agama yang tidak terhingga macamnya³⁰ dan yang dimaksud oleh nabi Muhammad dalam sabdanya :

قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ ُ إِنِّي َسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ ُ بِهِ خَيْرًا ُ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (رواه ومسلم)³¹

Artinya : Barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberikan kebajikan dan keutamaan, niscaya diberikan kepadanya faham yang mendalam dalam hukum agama. (H.R Muslim)

Maka kalimat *yufaqqihhu* diartikan yaitu diberikan kefahaman yang mendalam. Ini berarti kalimat Fikih tidak hanya terbatas pada hukum-hukum Islam saja, akan tetapi lebih luas lagi segala aspek agama Islam.³²

Adapun definisi Fikih secara istilah adalah :

وَاصْطِلَاحًا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ³³ ِ
Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

Dr Wahab Khalaf dalam bukunya Ushul al-Fiqh mengartikan Fikih sebagai berikut : Fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail, atau kodifikasi hukum-hukum syariat Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.³⁴

Adapun Fikih sebagai mata pelajaran berarti Fikih adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik, untuk mengenal, memahami, menghayati dan

³⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 10.

³¹Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz II*, (Bairut Libanon: Darul Kutub Al-alamiyah, Tth), hlm. 719.

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 11.

³³Abi Yahya Zakariya, *loc. cit.*, Juz 1.

³⁴Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ushulul Fikih (terj)*, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 23.

mengamalkan hukum Islam kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.³⁵

2. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih

a. Materi

Bahan/materi pengajaran adalah apa yang harus diberikan kepada murid, bisa berupa pengetahuan, sikap/nilai serta keterampilan apa yang harus dipelajari.³⁶ Isi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tetapi harus merupakan pengetahuan terpilih dan diperbolehkan baik sebagai pengetahuan itu sendiri, maupun bagi siswa dan lingkungannya.³⁷

Ruang lingkup Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia meliputi :

- 1) Aspek Fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tata cara *thaharah*, salat fardu, salat *sunnah*, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
- 2) Aspek Fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, *qirad*, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan *borg* serta upah.³⁸

³⁵Departemen Agama RI, *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta, 2004), hlm. 46.

³⁶Djamaluddin Darwis, “*Strategi Belajar Mengajar*” dalam Chabib Toha dan Abd Mu’ti (Eds), *PBM – PAI di Sekolah dan Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Agama Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 220.

³⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 127.

³⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah, 2008, hlm. 53.

Adapun standar kompetensi lulusan mata pelajaran Fiqih kelas VII terlampir.

b. Tujuan Pembelajaran Fiqih di MTs

Pembelajaran Fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* (sempurna).

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam Fiqih muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³⁹

c. Metode Pembelajaran Fiqih

Metode pembelajaran menurut Sudjana adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran.⁴⁰ Oleh karena itu peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar sangatlah penting. Dengan adanya metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain tercipta interaksi edukatif.

Metode mengajar itu dimaksudkan agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicernakan oleh anak dengan baik. Oleh karena itu terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh. Dalam

³⁹*Ibid.*, hlm. 55.

⁴⁰Nana Sujdana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet IV, 2000), hlm. 76.

melihat cara atau metode ini guru dibimbing oleh filsafat pendidikan yang dianut guru dalam tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Di samping itu penting juga memperhatikan hakikat anak didik yang hendak dididik dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan.⁴¹

Berikut beberapa variasi metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran Fikih:

1) Metode Ceramah.

Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu (waktu terbatas) dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah. Dalam metode ceramah ini murid duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang disampaikan guru itu adalah benar. Murid mengutip ikhtisar ceramah semampu murid itu sendiri dan menghafalnya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan.⁴²

2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan murid. Guru bertanya dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan murid. Manfaat terpenting dari metode ini adalah guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diceramahkan.⁴³

3) Metode Diskusi

⁴¹Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: 1982), hlm. 51.

⁴²Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), hlm. 19.

⁴³*Ibid.*, hlm. 20.

Metode diskusi adalah suatu cara untuk mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan obyektif. Cara ini menimbulkan perhatian dan perubahan tingkah laku anak dalam belajar. Metode diskusi juga dimaksudkan untuk dapat merangsang siswa dalam belajar dan berpikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan obyektif dalam pemecahan suatu masalah.⁴⁴

Metode diskusi ini sangat sesuai digunakan bilamana :

- a) Materi yang disajikan bersifat *low consensus problem* artinya bahan yang akan disajikan tersebut banyak mengandung permasalahan yang tingkat kesepakatannya masih rendah.
- b) Untuk pengembangan sikap atau tujuan-tujuan pengajaran yang bersifat afektif.
- c) Untuk tujuan-tujuan yang bersifat analisis sintesis, dan tingkat pemahaman yang tinggi.

Ada beberapa jenis diskusi yang dapat dilakukan oleh guru dalam membimbing siswa, antara lain :

- a) *Whole Group*

Whole group merupakan bentuk diskusi kelas di mana para pesertanya duduk setengah lingkaran. Dalam diskusi ini guru bertindak sebagai pemimpin, dan topik yang akan dibahas telah direncanakan sebelumnya.

- b) *Diskusi Kelompok*

Dalam diskusi kelompok biasanya dapat berupa diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 6 orang peserta, dan juga diskusi kelompok besar yang terdiri 7-15 orang peserta. Dalam diskusi tersebut dibahas tentang suatu topik tertentu dan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Para anggota diskusi

⁴⁴M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputra Pres, 2002), hlm. 36.

diberikan kesempatan berbicara atau mengemukakan pendapat dalam pemecahan masalah.

c) *Buzz Group*

Bentuk diskusi ini terdiri dari kelas yang dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang peserta. Tempat duduk diatur sedemikian rupa agar para siswa dapat bertukar pikiran dan bertatap muka dengan mudah. Diskusi ini biasanya diadakan di tengah-tengah pelajaran atau di akhir pelajaran dengan maksud untuk memperjelas dan mempertajam kerangka bahan pelajaran atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

d) *Panel*

Yang dimaksud panel di sini adalah suatu bentuk diskusi yang terdiri dari 3-6 orang peserta untuk mendiskusikan suatu topik tertentu dan duduk dalam semi melingkar yang dipimpin oleh seorang moderator. Biasanya dalam diskusi ini para *audien* tidak turut bicara, namun dalam forum tertentu para *audien* diperkenankan bicara.⁴⁵

4) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik.⁴⁶ Biasanya seorang guru menunjuk salah satu siswa untuk memperlihatkan pada kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya demonstrasi tentang tata cara memandikan mayat dengan cara menggunakan model atau boneka, tata cara haji, yang meliputi *thowaf*, *sa'i* dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode demonstrasi adalah :

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 40-41.

⁴⁶Ismail. SM, *op.cit.*, hlm. 20.

- a) Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa
- b) Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan.
- c) Persiapan-persiapan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai, dan diatur sesuai skenario yang direncanakan.
- d) Usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan jangan berlebih-lebihan⁴⁷

5) Metode *Drill*

Metode *drill* atau disebut latihan dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari. Karena hanya dengan melakukannya secara praktis suatu pengetahuan lebih mudah difahami dan di aplikasikan dalam kehidupan.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan metode *drill*, antara lain :

Pertama; harus disadari bahwa pengertian belajar bukan berarti pengulangan yang persis sama dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya oleh siswa, akan tetapi terjadinya sesuatu proses belajar dengan latihan siap adalah adanya situasi yang berbeda serta pengaruh latihan pertama, maka latihan kedua, ketiga dan seterusnya akan lain sifatnya.

Kedua; situasi belajar itulah yang mula-mula harus diulangi untuk mendapat respons dari siswa. Bilamana siswa dihadapkan dengan berbagai situasi belajar, maka dalam diri siswa akan timbul alasan untuk memberi respons, sehingga menyebabkan dia melatih keterampilannya. Bagaimana situasi tersebut dapat diubah-ubah kondisinya sehingga menuntut adanya perubahan respons, maka keterampilan siswa akan dapat lebih disempurnakan. Metode *drill* juga harus dimulai dari hal-hal yang mendasar agar siswa betul-betul

⁴⁷M. Basyiruddin Usman, *op.cit.*, hlm. 46.

mengerti apa yang telah dan akan dilakukannya agar diperoleh keterampilan yang diinginkan.⁴⁸

6) Metode pemberian tugas dan resitasi

Metode pemberian tugas dan resitasi adalah suatu cara dalam proses pembelajaran bilamana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari pada itu. Tugas dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lain yang cocok. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara kelompok. Oleh karena itu tugas dapat diberikan secara individual atau secara kelompok.⁴⁹

d. Evaluasi pembelajaran Fikih

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1983: 220). Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁰

Penilaian atau evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa.⁵¹

Menurut Nana Sudjana pada umumnya ada tiga pokok evaluasi yaitu:

- 1) Segi tingkah laku, artinya segi yang menyangkut sikap, minat perhatian, dan keterampilan siswa sebagai akibat dari proses belajar mengajar.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 55.

⁴⁹Ismail. SM, *op.cit.*, hlm. 20-21.

⁵⁰M. Chabib Thoha, M.A, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1996), hlm. 1.

⁵¹M Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

- 2) Segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan guru dalam proses mengajar.
- 3) Segi yang menyangkut proses mengajar dan belajar itu sendiri. Proses mengajar dan belajar perlu penilaian secara obyektif dari guru, akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai siswa.⁵²

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Prinsip integralitas : prinsip ini menghendaki bahwa rancangan evaluasi hasil belajar tidak hanya menyangkut teori, pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kepribadian siswa. Seperti apresiasi, sikap, minat, pemikiran kritis, proses adaptasi dan lain-lain.
- 2) Prinsip kontinuitas. Kontinuitas dalam evaluasi berarti guru secara *kontinu* membimbing pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dengan demikian program-program evaluasi pembelajaran merupakan rangkaian dari bimbingan belajar siswa. Maka penilaian seharusnya dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Prinsip obyektivitas. Dengan prinsip ini hasil evaluasi harus dapat diinterpretasikan dengan jelas dan tegas. Jadi setelah diadakan evaluasi pembelajaran terhadap siswa, keadaan siswa dapat diketahui dengan jelas dibanding sebelum evaluasi. Dengan kata lain dapat diketahui hasilnya.

Selain prinsip-prinsip evaluasi di atas ada beberapa kriteria evaluasi yang perlu dimiliki oleh guru, antara lain:

- 1) Validitas. Validitas atau ketepatan dalam evaluasi maksudnya, seorang guru harus benar-benar mampu dengan tepat menilai bidang yang mau dinilai.

⁵²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik {Dalam Interaksi Eabtlstij}*, (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2000), hlm. 213.

- 2) Reabilitas. Artinya, evaluasi yang diadakan oleh guru kepada murid-muridnya harus dapat memberikan hasil yang konsisten, tetap tidak berubah-ubah.
- 3) Praktis. Yakni tindakan evaluasi mudah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, baik menyangkut masalah waktu, biaya, maupun tenaga.⁵³

⁵³Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Bandung: Listafariska Putra, 2005), hlm. 10-101.